

Imajinasi Keindonesiaan

Oleh **Boni Hargens**

Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia

Di sebuah seminar yang menarik di Berlin (Jerman) beberapa waktu lalu, diselenggarakan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dan Keluarga Mahasiswa Katolik Indonesia (KMKI), seorang mahasiswa yang hadir mengajukan pertanyaan yang sinikal: sampai kapan Indonesia bisa benar? Kata benar di sini bermakna plural sehingga jawabannya pun jamak.

Namun, pertanyaan itu memaksa kita membongkar tesis tua soal apa itu bangsa. Ernest Renan (1882) dan para penganut nasionalisme konstruktivis lainnya mengingatkan kita dari dulu bahwa entitas kebangsaan itu ditentukan oleh kesamaan nasib di masa lalu dan kesamaan visi dan misi. Dalam bahasa Kymlica (1992), bangsa adalah *a historical community*, sebuah paguyuban sejarah.

Apakah setelah 65 tahun merdeka, Indonesia sudah menjadi paguyuban historis yang memiliki masa lalu dan visi dan misi yang sama?

Skeptisisme ini muncul setelah melihat untaian masalah sosial maupun politik yang cenderung ingin membelah Indonesia secara tragis berdasarkan haluan parsial. Padahal, Pancasila yang dianggap sebagai pandangan hidup mesti mengikat segala perbedaan dalam satu kesadaran yang sama, yakni kesadaran keindonesiaan. Ikatan integratif antarkelompok sosial sering kali longgar, entah karena permainan politik atau karena kepemimpinan politik yang tak kuat.

Sementara itu, pada aras elite, kita masih sulit menemukan praktik politik yang berpihak sepenuhnya pada rakyat. Sering kali elite bekerja untuk

kelompoknya atau sekadar untuk popularitas. Dalam hal pembangunan, yang diutamakan adalah kepentingan material sehingga politisi mudah berselingkuh dengan korporasi besar dalam berbagai aktivitas pertambangan, bahkan dalam 'proyek penghijauan', yang akhirnya menghancurkan alam dan manusia. Setidaknya, penilaian ini datang dari tokoh-tokoh Watch Indonesia, sebuah lembaga swadaya masyarakat di Berlin, seperti Alex Flor, Marianne Klute, dan Pipit D Kartawidjaya yang serius menanggapi masalah ini di Indonesia.

Kalau ditarik ke sumbu pokok, masalah kita adalah bagaimana mengisi kemerdekaan yang autentik. Setidaknya, nasionalisme dirasakan sebagai kekuatan yang membebaskan (Anthony D Smith, 1994: 3-23). Terkandung di dalamnya semangat membebaskan setiap orang dari segala bentuk hambatan, penindasan, dan keterikatan yang membatasi potensi untuk hidup merdeka.

Nah, apakah nasionalisme keindonesiaan telah membebaskan kita, baik secara individu maupun kelompok, dari segala hambatan atau kesulitan untuk hidup merdeka sepenuhnya? Jawaban atas pertanyaan tak pernah tuntas. Masih ada kelompok agama yang kesulitan beribadah karena rumah doanya diserbu atau dibakar kelompok tertentu yang sering kali bergerak

melampaui hukum; yang 'kewenangannya' sering membingungkan karena tak diatur dalam konstitusi namun tak pernah dihentikan oleh aparat penegak hukum.

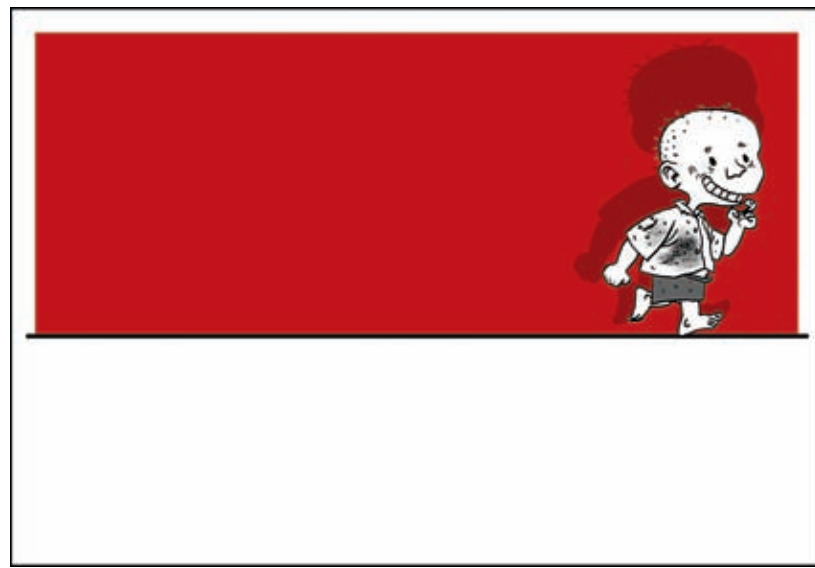
Adekan kekerasan horizontal sudah lazim, tetapi sikap diam aparat hukum dan pemerintah juga sudah lazim. Itu sebabnya, sulit bagi sebagian orang memisahkan kelompok radikal dengan kepentingan politik tertentu. Apalagi, politik terus berubah substansinya dari hal yang berkaitan dengan *res publica* menjadi sekadar kontestasi kekuasaan pragmatis. Prinsip liar machiavellisme

solusi ke depan. Pertama, kepemimpinan politik yang kuat dan kedua, perlu membangun dan menguatkan imajinasi keindonesiaan di tengah masyarakat yang plural.

Kepemimpinan politik

Ketika Soehartoisme masih berkuasa, seluruh elemen sosial dan politik membangun konsolidasi untuk menumbuhkan otoritarianisme yang bertahan selama 32 tahun. Rezim ini dilawan karena kepemimpinan politik dinilai tak berpihak lagi pada misi kesejahteraan rakyat.

Tapi, apa yang terjadi setelah 1998? Konsolidasi demokrasi tak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Guillermo O'Donnell dan Philippe C Schmitter (1986) dalam teori transisi politik klasik mereka mengatakan bahwa transisi akan selalu bersifat temporal dan terukur. Kita gagal membebarkan tesis ini. Termasuk juga konsep kedua orang ini tentang konsolidasi



PATA AREADI

demokrasi yang mencakup dua tahap, yakni tahap liberalisasi dan demokratisasi, belum berhasil di Indonesia. Kalau mengacu pada statistik Freedom House di Washington, kita sudah berhasil pada tahap liberalisasi sejak kita dimasukkan dalam daftar 89 negara yang disebut 'negara demokrasi liberal' pada tahun 2009 lalu. Akan tetapi, dalam hal demokratisasi itu sendiri kita

gandrung diterapkan. Pada ruang berpikir ini kita bisa melihat dengan jelas bahwa simbol agama yang melekat pada berbagai adegan kekerasan sipil ternyata tak ada irisan langsungnya dengan agama *an sich*. Maka dari itu, dalam konteks peringatan kemerdekaan Indonesia, di tengah berbagai masalah yang rumit, kita perlu menyepakati dua hal sebagai

Merdeka (untuk) Korupsi

Oleh **Umbu TW Pariangu**

Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana, Kupang

APA yang bisa diendapkan dari reminiscensi peringatan 17 Agustus RI? Sudah 65 tahun merdeka, dan satu dekade reformasi terlampaui, tetapi jiwa rakyat Indonesia masih tersekap dahsyatnya kemiskinan dan keterbelakangan. Cita-cita kemerdekaan yang membebaskan direduksi kegagalan kolektif elite mereakumulasi spirit kejujuran, pengorbanan, dan kerja cerdas sehingga hasilnya: kekuasaan yang hanya memberi makan para koruptor. Bukan rakyat kecil! Memperingati dirgahayu RI, momentum sakral yang juga dirayakan semarak para koruptor di Indonesia.

Jalan tol korupsi

Ibarat jalan tol, negeri ini sudah 'dibayar' para koruptor guna meluapkan syahwat 'predator'-nya menjarah harta negara tanpa hambatan. Kalau tahun 2007 ada kasus anggota DPR yang mendapat karcis bebas bayar tol, kini kejaksaan, pengadilan, kepolisian, bahkan partai (penguasa) pun ramai-ramai merebut 'karcis tol' korupsi guna melampatgandakan kekuasaan dan kekayaannya. Mirip seruan Bung Karno, *for a fighting nation, there is no journey's end*, bagi bangsa pejuang (korupsi) tidak ada stasiun terakhir. Melalui pemberitaan media massa dan TV kita melihat koruptor menancapkan kakinya dari pusat sampai daerah.

Wabah korupsi di Indonesia kian mengafirmasi teori kejahatan negaranya Green dan Ward (2004) bahwa di dalam negara ada potensi kejahatan. Ini tecermin dalam ketidakmampuan negara menyejahterakan rakyat di mana rakyat menjadi korban substrats korupsi terutama *white-collar-crime* (Mustofa, 2010). Padahal Pasal 1 ayat 6 UU No

39/1999 tentang HAM menegaskan kegagalan mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan pelanggaran/kejahatan HAM yang kian memuskilkan terwujudnya *salus populi suprema lex*.

Cairnya peluru perlawanan korupsi pada aksi fakultatif *zero corruption* membuktikan impotensi pemerintah menaikan hak-hak dasar rakyat. Meski tiga tahun silam Presiden SBY mencanangkan reformasi birokrasi dimulai dari Depkeu, BPK, dan MA, lalu di Hari Antikorupsi Internasional (8/12/2009) berjanji memimpin langsung jihad pemberantasan korupsi, ini pun tak meredupkan predikat kita sebagai bangsa terulung yang membidani lahirnya—modus—koruptor baru.

Kita mestinya minder dengan pemimpin di China yang berani menghukum mati koruptornya. Pada Maret 2000 misalnya, Wakil Gubernur Provinsi Jiangxi China menghukum mati Hu Chang-ging karena terbukti menerima suap Rp5,1 miliar. Dua tahun kemudian, Li Yushu, Deputi Wali Kota Leshan, satu dari 4.300 warga China yang dieksekusi mati karena suap dan tindakan memperkaya diri.

Sebaliknya, Indonesia sibuk mengumbar citra di dalam dan di luar sebagai negara bersih dan demokratis. Kita lebih bangga dianugerahi komunitas internasional sebagai 'juara demokrasi' dalam forum komunitas demokrasi di Krakow, Polandia, belum lama ini 'mengalahkan' China yang oleh Hillary Clinton disejajarkan dengan negara yang memiliki pemerintahan tidak toleran (a-demokratis).

Apa artinya citra yang dibumbui proforma, tetapi selalu kehilangan respons berhadapan dengan tentakel korupsi yang menyelinap di institusi hukum, birokrasi dari pusat sampai daerah. Politik kebijakan nirkorupsi pemerintah hanya menjadi *dirty business*, menanak citra dalam tungku kebohongan sistematis kekuasaan.

Mestinya Presiden SBY ini meniru

Presiden Nigeria Goodluck Jonathan memecat dua pejabat tinggi perusahaan minyak Nigeria milik negara (NNPC) yang dilanda utang Rp45 triliun akibat korupsi. Karena warga mengeluhkan maraknya praktik memperkaya diri pejabat partai dan pemerintahan, sejak 11 Juli lalu pemerintah China mewajibkan para pejabat dan petinggi badan usaha milik negara melaporkan kekayaannya. Sayang di sini, tenggorokan pers, aktivis antikorupsi malah 'difikam' ketika meneriakkan rekening gendut oknum Polri.

Tak kalah ironisnya, ketika para bupati berkeluh soal aparat yang asal



Kalau skandal-skandal di atas tadi berhasil digelapkan para 'politisi hitam' yang bersekongkol dengan makelar hukum, berarti negara ini kian mendekati dirinya pada stasiun akhir yang bernama *collapse state* (negara gagal)."

main tangkap dalam penanganan dugaan korupsi, di pertemuan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Madiun, Presiden langsung meresponsinya 'jangan main tahanan, kalau tidak perlu kenapa dilakukan'. 'Pembelaan vulgar' ini bisa dipahami dalam intensi menjaga kontinuitas pemerintahan daerah. Tapi problemnya, penguasa dari level pusat-daerah agaknya telanjur menerjemahkan kekuasaan sebagai momentum memelihara egoisme dan tribalitas politik (Felson & Calrke, 1998) sehingga proteksi Presiden SBY ini berpeluang

dijadikan tameng para bupati/wali kota berkompromi dengan aparat penegak hukum. Maka hari-hari ini kita 'menikmati' musim megalomania kejayaan para terduga korupsi di daerah memenangi pilkada seperti di Rembang, Kepulauan Aru, Lampung, dan Bengkulu.

Hobbes (Leviathan: 376) pernah berpremis, secara kodrati manusia (politie) punya hasrat atau nafsu (*appetie*) dan keengganan (*aversions*) yang menuntut perilaku mereka. *Appetites* berbicara tentang nafsu kekuasaan, kekayaan, kehormatan, sedangkan *aversions* soal keengganan manusia untuk hidup sengsara dan mati. Dua karakter ini yang memudahkan kita memahami matinya konsolidasi demokrasi pasca-1998. Secara institusional kita mampu mengkonsolidasi elemen-elemen progresif, tetapi tidak demikian dengan perilaku. Bahkan Cecep Hidayat, pengamat politik dari Universitas Indonesia mengatakan bangsa Indonesia memerlukan tiga generasi untuk membangun aksentuasi perilaku berdemokrasi yang jujur.

Kenapa harus ada demokrasi?

Saat Herbert Feith mengkritik perkembangan demokrasi liberal di Indonesia tahun 1955: kenapa demokrasi Indonesia gagal? HJ Benda justru membalik pertanyaan, 'kenapa harus ada demokrasi di Indonesia?' (Jurdi, 2008). Persisnya, kenapa harus demokrasi jika rakyat masih menyaksikan politisi kasus berkeluh ria dari standar moral dan jeratan hukum di atas cerobong oligarki kekuasaan. Intelektual, kaum agamawan/moralis, kriminolog, pendekar hukum, para aktivis reformasi di negeri ini justru teremajakan dalam aliansi najis yang mentransformasi patologik Orde Baru dari pemilu ke pemilu pasca-1998 lewat perilaku predatorik mereka.

Mestikah niat luhur mereduksi korupsi harus digadaikan di tangan

belum berhasil. Ukurannya adalah institusi yang kuat dan keterjaminan hidup warga negara yang optimal.

Perubahan hanya bisa sukses kalau ada kepemimpinan politik yang kuat. Suatu kepemimpinan yang berlandaskan pada konstitusi dan bekerja secara total untuk bangsa dan negara secara total dan konstitusional tanpa promiskuitas dengan kepentingan parsial atau dengan kartel politik apa pun di balik layar.

Imajinasi keindonesiaan

Perubahan juga bisa terjadi kalau ada integrasi sosial yang kuat di tengah masyarakat yang plural. Pada konteks ini, kita perlu mengingat tesis Benedict Anderson tentang The Imagined Community. Bahwa identitas kebangsaan ditentukan oleh kemampuan seluruh elemen untuk membayangkan diri sebagai satu entitas.

Historisisme Anderson adalah sebuah logika linear yang tentu saja *debatable*. Setidaknya, dalam seluruh analisisnya, Anderson tak sempat membayangkan bahwa logika kebangsaan mengikuti gerak kurva Cartesian (x,y). Bahwa kalau kemampuan membayangkan diri sebagai bangsa adalah sebuah gerak +x, maka akan selalu ada kemungkinan gerak itu berbalik menjadi -x ketika potensi memecah-belah bangsa lebih besar daripada kemampuan memperkuat kesatuan.

Persis ini tantangan kita, bagaimana membangun imajinasi keindonesiaan pada saat kekuatan destruktif makin besar. Harus ada kehendak alamiah dari setiap kelompok berbeda untuk saling menghargai dan saling membutuhkan sehingga konflik bisa diminimalisasi. Selain itu, yang paling utama adalah adanya kepemimpinan politik yang kuat yang bisa menerbitkan ruang publik agar selaras selalu dengan konstitusi demokratis.

mereka? Kadang-kadang skeptisisme amat kita butuhkan untuk menyediakan sekaligus menjustificasi legitimasi sebagai basis upaya perbaikan dari kekurangan yang ada (Akdar, 1995). Persoalannya, bagaimana skeptisisme ini mampu dikonstruksi dalam ikhtikad yang konstruktif. Di batas ini kita sering kehabisan energi meski lokomotif redemokratisasi harus terus bergerak.

Skandal korupsi yang dimurkakan rakyat tak bisa selesai tanpa disertai tindakan nyata (*the secret of getting things done is to act*) pemimpinnya, bahkan sekadar menyalakannya dalam ritus-ritus politik-kenegaraan. Spirit kemerdekaan hendaknya menyemangati negeri ini untuk bangkit dari romantisme kejayaan semu selama 32 tahun yang nyaris menimbun rakyat Indonesia dalam reruntuhan keterpurukan. Cukup sudah vandalisme korupsi menguasai kerajaan tontonan (*kingdom of spectacle*) negara yang memerdekakan para bandit-bandit korup ini.

Presiden sebagai empu (*craftmen*) pemberantasan korupsi harus berani menciptakan pemerintahan yang bersih. Misalnya, segera membersihkan institusi penegakan hukum terutama kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun parpol dari tabiat korupsi (politik) sebab pada terobosan progresif inilah tersimpan asa 234 juta rakyat akan terwujudnya negara demokratis, adil dan sejahtera. Responsibilitas politik sebagai kepala negara yang berdiri di atas semua kepentingan sejinanya dituntut untuk memperjelas sejauh mana kasus-kasus hukum besar (kriminalisasi pimpinan KPK, Centurygate, kasus Anggodo) ini diproses sehingga kepastian hukum yang didukung-dengungkan dari bilik pencitraan pemerintah bukan prokreasi politik belaka.

Kalau skandal-skandal di atas tadi berhasil digelapkan para 'politisi hitam' yang bersekongkol dengan makelar hukum, berarti negara ini kian mendekati dirinya pada stasiun akhir yang bernama *collapse state* (negara gagal). Hawa kemerdekaan pun sirna meninggalkan rakyatnya yang menggigit dalam selimut kemiskinan. *It is a nightmare!*

PARTISIPASI OPINI

Kirimkan ke email: opini@mediaindonesia.com atau opini@yaho.com atau fax: (021) 5812105 (Maksimal 7.100 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon dan foto kopi KTP).

MI MEDIA INDONESIA

Pendirir: Drs. H. Teuku Yousli Syah MSI (Alm)
Direktur Utama: Rahni Lowhur-Schad
Direktur Pemberitaan: Saur M. Hutabarat
Dewan Redaksi Media Group: Elman Saragih (Ketua), Ana Widjaya, Andy F.Noya, Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudrajat, Djafar H. Assegaff, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Saur M. Hutabarat, Sugeng Suparwoto, Suryoprato, Toeti Adhitama
Redaktur Senior: Elman Saragih, Laurens Tato, Saur M. Hutabarat
Kepala Divisi Pemberitaan: Usman Kansong
Deputi Kepala Divisi Pemberitaan: Kleden Suban
Kepala Divisi Content Enrichment: Gaudensius Suhardi
Sekretaris Redaksi: Teguh Nirwahjudi

Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Abdul Kohar, Ade Alawi, Haryo Prasetyo, Ono Sarwono, Rosmery C.Sihombing
Asisten Kepala Divisi Foto: Haryanto

Redaktur: Agus Mulyawan, Agus Wahyu Kristianto, Cri Qanon Ria Dewi, Eko Rahmawanto, Eko Suprihanto, Fitriana Siregar, Gantyo Koespradono, Hapsoro Poetro, Henri Salomo Siagian, Ida Farida, Jaka Budisantosa, Lintang Rowe, Mathias S. Brahmana, Mochamad Anwar Surachman, Sadyo Kristiarto, Santhy M. Sibarani, Soelstijono

Staf Redaksi: Adam Dwi Putra, Agung Wibowo, Ahmad Maulana, Ahmad Purno, Anton Kustedia, Aries Wijaksana, Asep Taha, Basuki Eka Purnama, Bintang Krisanti, Clara Rondonuwu, Cornelius Eko, David Tobing, Denny Parsaulian, Deri Dahuri, Dian Palupi, Dimny Mutiah, Dwi Tupani Gunarwati, Edwin Tirani, Emir Chairullah, Eni Kartinah, Eri Anugrah, Fardiansah Noor, Gino F. Hadi, Handi Andrian, Heni Rahayu, Heru Prihantoro, Heryadi, Hillarius U. Gani, Iis Zatinika, Intan Juita, Irana Shalindra, Ivan Sihombing, Jajang Sumantri, Jerome Eugene, Jonggi Pangihutan M., K. Wisnu Broto, Kennorton Hutaso, M. Soleh, Maya Puspitastari, Mirza Andreas, Mohamad Irfan, Muhammad Fauzi, Raja Suhud V.H.M. Ramdani, Ratna Nuraini, Rina Garmina, Ririn Radhiawati Kusuma, Rini Widuri Ragillia, Rommy Pujiyanto, Selamat Saragih, Sica Harum, Sidik Pramono, Stewartini Suryandari, Sitriah Hamid, Sugeng Sumaryadi, Sulaiman Basri, Sumaryanto, Susanto, Syarifie Oubaidillah, Thelati Yani, Tutus Subronto, Wendy Mehari, Windy Dyah Indriantari, Zubaedah Hanum

Biro Redaksi: Eriez M. Rizal (**Bandung**); Kisar Rajagukguk (**Depok**); Firman Saragih (**Karawang**); Yusuf Riaman (**NTB**); Baharman (**Palembang**); Parullian Manulang (**Padang**); Haryanto (**Semarang**); Widjajadi (**Solo**); Faishol Taselan (**Surabaya**)

MICOM
Asisten Kepala Divisi: Tjahyo Utomo, Victor J.P. Nababan
Redaktur: Agus Triwibowo, Asnawi Khaddaf, Patna Budi Utami, Widhoroso
Staf: Abadi Surono, Abdul Salam, Alfani T. Wijaksana, Charles Silaban, M. Syaifullah, Nurtjahyadi, Panji Arimurti, Prita Daneswari, Rani Nuraimi, Ricky Julian, Widjokongko, Wisnu Arto Subari.

PUBLISHING
Asisten Kepala Divisi: Jessica Huwae
Staf: Adeste Adipriyanti, Regina Panontongan, Sem Sahala Purba

CONTENT ENRICHMENT
Asisten Kepala Divisi: Yohanes S. Widada
Periset: Heru Prasetyo (**Redaktur**), Desi Yasmini S, Radi Negara
Bahasa: Dony Tjiptonugroho (**Redaktur**), Adang Iskandar, Mahmudi, Ni Nyoman Dwi Astarini, Riko Alfonso, Suprianto

ARTISTIK
Redaktur: Diana Kusnati, Gatot Purnomo, Marjuki, Prayogi, Ruddy Pata Areadi
Staf Redaksi: Ali Firdaus, Ananto Prabowo, Andi Nursandi, Annette Natalia, Bayu Wicaksono, Budi Haryanto, Budi Setyo Widodo, Dharma Soleh, Donatus Ola Pereda, Endang Mawardi, Gugun Permana, Hari Syahrir, Haryadi, Marionsandez G. M. Rusli, Muhamad Nasir, Muhamad Yusuf, Nana Sutisna, Novi Hernando, Nurkama Ismono, Permana, Tutik Sunarsih, Warta Santosi, Winston King
Manajer Produksi: Bambang Sumarsono
Deputi Manajer Produksi: Asnan

Direktur Pengembangan Bisnis: Alexander Stefanus
Kepala Divisi Marketing Communication: Fitriana Saiful Bachri
Asisten Kepala Divisi Iklan: Gustaf Bernhard R
Asisten Kepala Divisi Marketing Support & Publishing: Andreas Sujijono
Asisten Kepala Divisi Sirkulasi-Distribusi: Tweeki Triandianto
Perwakilan Bandung: Aji Sukaryo (022) 4210500; Medan: A Masduki Kadrio (061) 4514945; Padang: Yondri (0751) 811464; Pekanbaru: Ferry Mustanto (0761) 856647; Surabaya: Tri Febrianto (031) 5667359; Bogor: Arief Ibnu (0251) 8349985; Denpasar: Pieter Sahertian (0361) 239210, Lampung: Muharis (0721) 773888; Semarang: Desijhon (024) 7461524; Yogyakarta: Andi

Yudhanto (0274) 7497289; Palembang: Andi Hendriansyah (0711)317526.

Telepon/Fax Layanan Pembaca: (021) 5821303. **Telepon/Fax Iklan:** (021) 5812107, 5812113. **Telepon Sirkulasi:** (021) 5812095. **Telepon Distribusi:** (021) 5812077. **Telepon Peretakan:** (021) 5812086. **Harga Langganan:** Rp67.000 per bulan (Jabodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim. **No. Rekening Bank:** a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman Kebon Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Sudirman: 035-306-5014. **Diterbitkan oleh:** PT Citra Media Nusa Purnama. Jakarta. **Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan/Sirkulasi:** Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520. **Telepon:** (021) 5812088 (Hunting). **Fax:** (021) 5812102, 5812105 (**Redaksi**)
e-mail: redaksi@mediaindonesia.com. **Peretakan:** Media Indonesia, Jakarta. **ISSN:** 0215-4935. **Website:** www.mediaindonesia.com.

DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DEKORASI ALASAN APA PUN

Member of **MEDIA GROUP**